

Construction Index of Islamic Economics and Empirical Studies in Indonesia

Konstruksi Indeks Keislaman Ekonomi dan Kajian Empirisnya di Indonesia

Ali Rama

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

email: rama@uinjkt.ac.id

Abstract : Some earlier studies show that religion and economic activities have strong relationship. The study measured the level of 'the Islamic economy' provinces in Indonesia using the model 'index of the Islamic economy'. The index concept is actually a composite index derived from main purposes of Islamic economy system. The main concepts are divided into several Islamic economic principles then proxied by several relevant and measurable economic indicators. The model provides ranking of Islamic economy performance for all provinces in Indonesia. This study found that the South Sumatra province occupies the highest position in the acquisition of the index score. Instead, the province of Papua into the provinces which have the lowest index score compared to other provinces. Furthermore, there are only a total of 11 provinces of the provinces in Indonesia which has an index score above 50 points. This means an average of regions / provinces in Indonesia have a performance index on the achievement of the objectives of Islamic economy system is relatively low.

Abstraksi : Terdapat sejumlah studi yang membuktikan bahwa agama dan kinerja ekonomi memiliki hubungan yang kuat. Studi ini mengukur tingkat 'keislaman ekonomi' provinsi-provinsi di Indonesia menggunakan model 'indeks keislaman ekonomi'. Konsep indeks ini merupakan indeks komposit dari tujuan utama yang ingin dicapai oleh sistem ekonomi Islam. Tujuan utama tersebut selanjutnya diturunkan menjadi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang nantinya akan diproksikan oleh sejumlah indikator ekonomi yang relevan dan terukur. Model ini menghasilkan peringkat rangking 'keislaman' ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia dalam bentuk indeks. Penelitian ini menemukan bahwa provinsi Sumatera Selatan menempati

posisi tertinggi dalam perolehan skor indeks. Sebaliknya, provinsi Papua menjadi provinsi yang memiliki skor indeks terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Selanjutnya, hanya terdapat 11 provinsi dari total provinsi di Indonesia yang memiliki skor indeks di atas 50 poin. Hal ini berarti rata-rata wilayah/provinsi di Indonesia memiliki kinerja indeks pada pencapaian tujuan sistem ekonomi Islam relatif rendah.

Keywords: *Index on Islamic economics, welfare economics, income distribution.*

A. Latar Belakang

Studi hubungan antara agama dengan ekonomi belakangan ini menjadi perhatian bagi para ekonom. Terutama setelah munculnya berbagai jenis sektor ekonomi berbasis pada syariah seperti perbankan dan keuangan syariah, makanan & minuman halal, *fashion* syariah, pariwisata dan kuliner syariah, media dan hiburan syariah, dan sektor ekonomi syariah lainnya. Sehingga muncul istilah perekonomian Islam (*Islamic economy*), yaitu suatu bentuk perekonomian yang lahir dari aktivitas ekonomi penduduk Muslim yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.¹ Sektor ekonomi berbasis agama (Islam) tersebut digerakkan oleh gaya hidup Muslim, perilaku konsumsi dan produksi serta praktek bisnis.

Di kalangan ekonom Barat, studi hubungan antara agama dengan ekonomi terpolarisasi kepada dua pandangan, yaitu pihak yang melihat agama sebagai variabel dependen (terikat)² dan yang melihatnya sebagai variabel independen (bebas).³ Ketika agama dilihat sebagai variabel dependen, maka berimplikasi bahwa tingkat perkembangan ekonomi, seperti pendapatan, standar hidup, kebijakan pemerintah berdampak pada tingkat “keberagamaan” (*degree of religiosity*), seperti tingkat kehadiran di mesjid atau di gereja dan ritual agama lainnya. Sebaliknya, jika agama ditempatkan sebagai variabel independen maka tingkat “keberagamaan” akan berdampak pada ekonomi, seperti kinerja ekonomi, produktivitas, etika dan semangat kerja, dan sebagainya.

Hubungan antara agama dengan ekonomi berdasarkan studi

literatur oleh Iannaccone, 1998 ditemukan terdapat tiga pola umum, yaitu (i) penelitian yang menginterpretasikan perilaku keberagamaan (*religious behavior*) dengan menggunakan pendekatan ekonomi, yaitu menggunakan teori, model dan teknik ekonomi untuk menjelaskan pola perilaku keberagamaan individu ataupun kelompok; (ii) penelitian tentang dampak agama dalam ekonomi; dan (iii) penelitian tentang prinsip teologi atau ajaran tertulis (seperti al-Quran & al-Hadist, Injil dan Bibel) dalam mendorong atau mengkritisi kebijakan ekonomi.⁴

Mengukur derajat keberagamaan (*degree of religiousness*), menurut Rehman dan Askari⁵ bersifat kompleks dan kontroversi. Dalam konteks Islam, misalnya, apa yang dimaksud dengan negara Islam?⁶ Bagaimana mengukur tingkat/derajat keIslaman (*islamicity*) suatu negara? Apakah negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara Islam sudah benar-benar menjalankan ajaran Islam dalam semua aspeknya, misalnya di bidang ekonomi, atau hanya sekedar label Islam saja? Oleh karena itu, perlu studi empiris untuk mengukur derajat “keIslaman” negara Muslim melalui indikator-indikator terukur dalam bidang tertentu, misalnya di bidang ekonomi. Sejauh mana tingkat keIslaman ekonomi negara Muslim.

Di sisi lain, dibutuhkan sebuah studi empiris yang dapat memperkuat klaim bahwa Islam (perilaku berIslam) mendorong kinerja ekonomi. Studi empiris ini sebagai *counter* bagi kalangan yang menyalahkan Islam atas keterbelakangan (ekonomi) sebagian besar negara-negara Muslim. Dan juga *counter* bagi pengikut hipotesis sekularisme yang mengatakan semakin tinggi tingkat ekonomi, semakin rendah tingkat keberagamaan.⁷

Terdapat beberapa studi terdahulu yang mengukur tingkat “keIslaman” (*Islamicity*) suatu negara, diantaranya dilakukan oleh Anto,⁸ Hasan dan Syed,⁹ Omar dkk.,¹⁰ dan Rehman dan Askari.¹¹ Rehman dan Askari, misalnya, mengembangkan suatu model indeks dengan nama “Economic Islamicity Index” yang mengukur tingkat keIslaman ekonomi 208 negara di dunia termasuk negara Muslim dan non-Muslim melalui

beberapa Indikator ekonomi yang dianggap representasi dari tujuan sistem ekonomi Islam. Temuan penelitian tersebut sangat kontroversi karena menempatkan Irlandia sebagai peringkat pertama, Denmark dan Amerika Serikat masing-masing di urutan ke-2 dan ke-5 sebagai negara yang paling tinggi indikator keIslaman ekonominya. Sementara negara Muslim seperti Malaysia hanya menempati peringkat ke-33, tertinggi di antara negara Muslim lainnya, tetapi masih lebih rendah dari Israel (ke-27). Ironisnya, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia justru berada di urutan ke-104. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa negara-negara yang dianggap sebagai negara Muslim (setidaknya negara OKI) belum mengadopsi kebijakan ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam.¹²

Sebagai pengembangan penelitian tersebut, perlu dilakukan eksplorasi lebih dalam untuk melihat bagaimana tingkat keIslaman berbagai wilayah yang ada di dalam suatu negara Muslim, yaitu mengukur tingkat pelaksanaan kebijakan ekonomi dan keuangan ajaran Islam atau tercapainya tujuan dari sistem ekonomi dan keuangan Islam. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengukur derajat keIslaman ekonomiprovinci di Indonesia dengan menggunakan model "indeks keIslaman ekonomi" dengan mengadaptasi studi Rehman dan Askari. Melihat tingkat keIslaman ekonomi masing-masing provinsi di Indonesia menarik untuk diteliti mengingat pada kenyataannya komposisi keberagaman wilayah di Indonesia cukup beragam. Ada sebagian wilayah mayoritas penduduknya adalah Muslim dan sebagian lainnya justru sebaliknya. Di sisi lain, ada wilayah yang secara resmi menerapkan hukum/syariat Islam dan sebagian lainnya tidak.

Namun perlu dipahami bahwa mengukur keIslaman atau tingkat keIslaman bukanlah sesuatu yang mudah mengingat bahwa tingkat keIslaman tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang nampak (*tangible*) dan dapat ukur (*measurable*). Kalaupun nampak dan terukur belum tentu data yang tersedia dapat merepresentasikan "keIslaman"

yang dimaksud. Sehingga perlu membuat pengukuran dan metode tersendiri.¹³

B. Literature Review/Kerangka Teori

1. Hubungan antara Agama dengan Ekonomi

Studi hubungan antara agama (*religion*) dan aktivitas ekonomi (*economic activity*) sudah banyak dikaji. Bahkan menjadi objek kajian tersendiri dengan nama “Economic of Religion” yang diajarkan di berbagai universitas, terutama di universita Eropa atau Barat. Agama dalam kajian mereka ditempatkan dalam bentuk suatu variabel yang dapat dicari hubungan kausalitasnya dengan berbagai variabel, diantaranya variabel ekonomi. Agama dalam perpektif studi tersebut terefleksikan dalam bentuk perilaku keagamaan yang dapat diteliti, nampak dan terukur

Studi hubungan antara agama dan aktivitas ekonomi memberikan perspektif tersendiri dalam membentuk teori ekonomi; bagaimana model ekonomi dapat dimodifikasi untuk menganalisis tingkat keyakinan (*beliefs*), norma (*norms*) dan nilai (*values*), dan eksplorasi bagaimana agama berdampak terhadap perilaku ekonomi dan aktivitas individu, kelompok dan masyarakat. Menurut Iannaccone,¹⁴ studi tentang agama dan ekonomi umumnya di seputar tiga hal, yaitu (1) studi yang menafsirkan perilaku kebergamaan (*religious behavior*) berdasarkan perspektif ekonomi, menggunakan teori dan teknik ekonomi untuk menjelaskan pola perilaku keberagamaan di antara individu, kelompok dan budaya; (2) studi tentang dampak agama terhadap ekonomi; dan (3) penggunaan perspektif teologi untuk mendorong atau mengkritisi kebijakan ekonomi.

Diskusi antara agama dan ekonomi umumnya terpolarisasi pada dua perspektif, yaitu kubu yang menempatkan agama (tingkat keberagamaan) sebagai variabel independen (bebas) dan kubu yang menempatkannya

sebagai variabel dependen (terikat).¹⁵ Jika agama diletakkan sebagai variabel dependen maka bermakna bahwa tingkat pembangunan ekonomi seperti pendapatan, kebijakan intervensi pemerintah dalam ekonomi, berdampak pada tingkat keberagamaan (*degree of religiosity*), seperti frekuensi kehadiran di mesjid atau gereja atau ritual agama lainnya. Artinya, tingkat ekonomi berkorelasi terhadap peningkatan atau penurunan tingkat keberagamaan masyarakat. Barro dan McCleary,¹⁶ misalnya, menemukan bahwa kemajuan ekonomi justru menurunkan tingkat kehadiran pemeluk agama di gereja. Temuan ini memperkuat **hipotesis sekularisasi**.

Sebaliknya, jika agama diposisikan sebagai variabel independen maka tingkat keberagamaan mempengaruhi perilaku dan kebijakan ekonomi, seperti kinerja ekonomi, produktivitas, etika kerja dan pengembangan sosial. Misalnya, tingkat partisipasi pada ritual formal agama menurut Barro dan McCleary,¹⁷ Campante dan Drott,¹⁸ dan Grier¹⁹ dan nilai menentukan karakter individu yang pada akhirnya berdampak kepada kinerja ekonomi, seperti produktivitas. Pendekatan ini merupakan *counter* terhadap hipotesis sekular sebelumnya.

Dalam konteks ekonomi Islam, hubungan antara agama dengan aktivitas ekonomi tidak semata dilihat dalam perspektif hubungan antar variabel. Menurut Kahf²⁰ agama dan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat. Agama diartikan sebagai sekumpulan kepercayaan dan keyakinan yang harus menuntun perilaku individu kepada Tuhan, sesama manusia dan dirinya sendiri. Salah satu domain agama, menurutnya, adalah perilaku manusia dalam setiap tingkatan dan aspek. Sementara ekonomi, lanjutnya, adalah studi tentang perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, perilaku ekonomi adalah merupakan salah satu domain yang menjadi konsen dari agama. Dengan demikian, Islam sebagai sebuah agama memiliki sekumpulan prinsip dan ketentuan yang menjadi petunjuk dalam menjalankan aktivitas ekonomi khususnya dalam pembentukan perilaku ekonomi baik dalam konsumsi, produksi maupun distribusi.²¹

Dalam konteks variabel ekonomi, terdapat beberapa penelitian yang berusaha menganalisis bagaimana dampak perilaku agama terhadap kinerja ekonomi. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Beik²² tentang peran zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian lainnya, misalnya, dilakukan oleh Rama²³ tentang bagaimana institusi ekonomi Islam, seperti perbankan syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Studi Tingkat Religiusitas/*Islamicity*

Terdapat beberapa penelitian yang berusaha mengukur tingkat “keislaman” atau “*Islamicity*” suatu kelompok ataupun negara secara kuantitatif. Tingkat keislaman diukur berdasarkan pada beberapa indikator terukur yang dianggap representatif atau proksi dari nilai dan prinsip Islam. Ali dan Hasan,²⁴ misalnya, mengembangkan suatu indeks bernama *Maqashid al-Shariah based Development Index*, yaitu model indeks pembangunan berdasarkan perspektif *maqashid al-shariah*. Model ini dijadikan kerangka dalam mengukur tingkat pembangunan berdasarkan *maqashid al-shariah* di Pakistan. Penelitian yang cukup serupa juga dilakukan oleh Omar dkk.,²⁵ yaitu menganalisis trend “Islamisasi” di Malaysia menggunakan “*Islamization index*” sebagai indikator. Indeks tersebut dijadikan sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat “keIslaman” di Malaysia.

Penelitian lainnya yang sangat populer dan kontroversi dilakukan oleh Rehman dan Askari²⁶ dengan judul provokatif, “How Islamic are Islamic Countries?” Penelitian tersebut mengukur tingkat keIslaman (*Islamicity*) 208 negara di dunia termasuk negara Muslim dan non-Muslim dengan menggunakan indeks keIslaman (*Islamicity Index*). Temuan kontroversial dari penelitian tersebut adalah Negara New Zeland menempati ranking pertama dan setelahnya diikuti oleh Luxembourg di urutan kedua, Denmark dan Inggris masing-masing di urutan ke 6 dan 8. Malaysia sebagai negara Muslim mayoritas hanya menempati ranking 38. Sementara negara Muslim lainnya lebih rendah lagi, termasuk Indonesia

yang menempati ranking ke 140. Berdasarkan pada temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa negara yang mengklaim dirinya sebagai “negara Islam” (Muslim) setidaknya diukur dari keanggotaannya dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) tidak serta merta menjadi negara yang paling “Islami” dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam. Bahkan negara-negara yang non-Muslim justru lebih “Islami” berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian tersebut. Meskipun penelitian tersebut dianggap kontroversi dan tidak representatif oleh berbagai kalangan, tetapi penelitian tersebut berusaha mengukur tingkat keislaman suatu negara berdasarkan beberapa indikator yang sesuai dengan prinsip dan nilai Islam. Sehingga mendorong negara-negara Muslim untuk mencapai prinsip-prinsip Islam yang dapat diukur dalam bentuk kuantitatif.

Di samping itu, Rehman dan Askari²⁷ juga mengembangkan model indeks yang mengukur tingkat keislaman ekonomi negara di dunia melalui “Economic Islamicity Index”. Indeks ini merupakan pengembangan penelitian sebelumnya. Konsep indeks tersebut didasarkan pada derivasi tujuan utama dari sistem ekonomi Islam, yaitu (1) tercapainya keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan; (2) kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja; dan (3) adopsi praktek ekonomi dan keuangan Islam. Dari ketiga tujuan ekonomi Islam tersebut diturunkan menjadi dua belas prinsip ekonomi, yang selanjutnya diturunkan menjadi indikator-indikator ekonomi yang bisa kemudian dibobotkan menjadi sebuah Indeks yang merangking tingkat “keislaman ekonomi” negara-negara di dunia. Model tersebut berhasil mengukur tingkat keislaman negara-negara yang diteliti. Temuan penelitian tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian mereka terdahulu.

3. Indeks Keislaman Ekonomi

Islam, menurut Rehman dan Askari,²⁸ dan Matta,²⁹ adalah agama yang didasarkan pada aturan yang jelas (*arules-based religion*). Islam menyediakan garis petunjuk (*guidelines*) ekonomi yang detail untuk menciptakan

sistem ekonomi yang sukses dan berkeadilan. Tujuan utama Islam dalam ekonomi adalah untuk mengembangkan kesejahteraan ekonomi dan kesamaan struktur sosial bagi setiap masyarakat demi memaksimalkan kemampuan intelektual, melestasikan dan mengembangkan kekayaan, dan aktif berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat.³⁰ Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi disertai keadilan sosial adalah fondasi dari sistem ekonomi Islam. Setiap individu dan pengambil kebijakan (pemerintah) berkewajiban untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan intelektual masyarakat, kemajuan ekonomi, dan kebebasan sosial.³¹

Tujuan Islam untuk masyarakat adalah terciptanya kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat disertai dengan keadilan sosial ekonomi³². Sistem ekonomi Islam pada hakekatnya adalah sistem berdasarkan pasar (*market based system*) yang wajib diwarnai oleh moral Islam dalam pelaku ekonomi, yaitu produser, konsumen, distributor dan pemerintah serta institusi ekonomi.³³ Berdasarkan pada visi Islam tersebut, maka sistem ekonomi Islam harusnya berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Sistem tersebut seharusnya memiliki tingkat yang lebih tinggi dalam berbagai aspek, terutama pada: (i) keadilan pada semua aspek pengelolaan ekonomi; (ii) standar moral; (iii) transparansi, keterbukaan, kepercayaan dan kejujuran dalam pasar ekonomi dan dalam setiap transaksi ekonomi, (iv) pengurangan kemiskinan, (v) distribusi kekayaan dan pendapatan, (vi) tidak ada eksploitasi dan penimbunan kekayaan, (vii) tidak ada kegiatan spekulasi yang berlebihan, (viii) mengedepankan berbagi risiko dibandingkan kontrak berbasis utang, (ix) infrastruktur dan pelayanan sosial, (x) perlakuan terhadap pekerja, (xi) porsi alokasi anggaran untuk pengembangan pendidikan, (xii) tabungan dan investasi, (xiii) perlindungan dan pelestarian lingkungan, dan banyak aspek lainnya. Tujuan dari sistem ekonomi Islam tersebut sebenarnya diturunkan dari ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadist.

Perbedaan atau keunggulan sistem ekonomi Islam tersebut diharapkan

tercermin pada angka kuantitatif dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi jika aturan dan tujuan Islam di adopsi dalam suatu perekonomian. Oleh karena itu perlu dikembangkan alat ukur yang dapat mengukur atau membandingkan ketercapaian dari tujuan-tujuan Islam dalam aspek ekonomi.

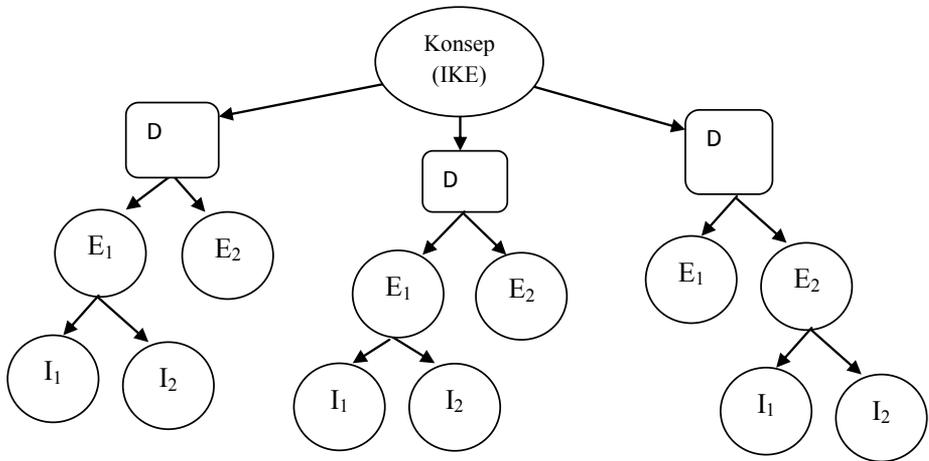
Penelitian ini akan mengadopsi model indeks yang dikembangkan Rehman dan Askari dalam mengukur tingkat keIslaman ekonomi wilayah-wilayah di Indonesia. Outputnya adalah ranking tingkat keIslaman ekonomi berbagai wilayah di Indonesia.

Indeks keIslaman ekonomi diturunkan dari tiga substansi dari tujuan ekonomi Islam, yaitu (i) tercapainya keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (ii) meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan; dan (iii) adopsi penerapan ekonomi dan keuangan syariah (Islam). Ketiga tujuan utama itu selanjutnya diturunkan ke dalam 12 (dua belas)³⁴ dimensi dan indikator ekonomi. Masing-masing kategori ekonomi tersebut akan direpresentasikan oleh proksi berupa variabel ekonomi yang terukur dalam bentuk data kuantitatif. Proksi tersebut disadari oleh peneliti belum sepenuhnya dapat menjadi indikator yang ideal bagi prinsip dan tujuan ekonomi Islam.

4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengukur kinerja ekonomi seluruh wilayah di Indonesia dalam hal pencapaian tujuan sistem ekonomi Islam dengan menggunakan indeks keIslaman ekonomi. Output penelitian adalah peringkat kinerja ekonomi dalam bentuk skor indeks. Konsep indeks yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan adaptasi dari model indeks keIslaman ekonomi (*economic Islamicity index*) yang dikembangkan oleh Rehman dan Askari. Indeks keIslaman ekonomi merupakan model indeks yang diturunkan dari tujuan utama yang ingin dicapai oleh sistem ekonomi Islam. Adapun tujuan tersebut adalah: (1) keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

(2) kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan; dan (3) Implementasi sistem keuangan Islam.



Gambar 1: Operasional Indeks KeIslaman Ekonomi (IKE)

Keterangan: IKE: Indeks KeIslaman Ekonomi ; **D**: Dimensi (3 tujuan sistem ekonomi Islam); **E**: Elemen ekonomi (12 prinsip ekonomi Islam), dan **I**: Indikator (34 indikator ekonomi)

Ketiga tujuan utama tersebut selanjutnya diturunkan dalam bentuk elemen dan indikator-indikator ekonomi yang terukur. Metode operasionalisasi konsep utama yaitu indeks keIslaman ekonomi mengadopsi metode Sekaran,³⁵ yaitu model operasionalisasi konsep ke dalam bentuk beberapa dimensi yang selanjutnya diderivasikan ke dalam beberapa elemen dan indikator yang terukur. Adapun elemen dan indikator ekonomi yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Simple Additive Weighting Method (SAW) dalam pembobotan, agregasi dan ranking. Gambar 1 memberikan visualisasi dari model Sekaran, yaitu mengoperasionalisasi konsep utama ke dalam dimensi, elemen dan indikator ekonomi.

Dengan demikian operasionalisasi dari konsep indeks keIslaman ekonomi adalah sebagai berikut: model indeks keIslaman ekonomi

dibangun dari tiga tujuan utama yang ingin dicapai oleh sistem ekonomi Islam, yaitu yaitu (1) keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan; dan (3) Implementasi sistem keuangan Islam. Ketiga tujuan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 12 dimensi utama, yaitu (1) kesempatan ekonomi dan kebebasan ekonomi; (2) keadilan dalam pengelolaan ekonomi; (3) perlakuan terhadap tenaga kerja; (4) Distribusi kekayaan dan pendapatan; (5) Stabilitas ekonomi; (6) Pengembangan pendidikan; (7) Pengurangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar; (8) Infrastruktur dan layanan sosial; (9) tingkat tabungan dan investasi; (10) Tingkat perdagangan; (11) Kesejahteraan ekonomi; dan (12) penghilangan riba. Kedua belas elemen tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 34 variabel atau indikator ekonomi yang terukur, yaitu (1) persentase bekerja terhadap angkatan kerja; (2) tingkat diskriminasi upah (kesenjangan gaji antara perempuan dan laki); (3) gender equity index; (4) tingkat upah minimum; (5) tingkat ketimpangan pendapatan (rasio gini); (6) tingkat persepsi korupsi; (7) tingkat inflasi; (8) tingkat pengangguran; (9) tingkat kriminalitas (rasio jumlah tindak pidana terhadap total populasi); (10) tingkat melek hidup; (11) alokasi anggaran pendidikan per kapita (rasio alokasi APBD untuk pendidikan terhadap *attending school*); (12) jumlah sekolah per kecamatan; (13) tingkat kemiskinan; (13) umur harapan hidup; (14) tingkat kepemilikan rumah; (15) akses terhadap air bersih; (16) ketersediaan listrik; (17) rasio puskesmas per kecamatan; (18) alokasi anggaran untuk kesehatan (rasio alokasi APBD untuk kesehatan terhadap total populasi); (19) alokasi belanja untuk modal (rasio alokasi APBD untuk modal terhadap total populasi); (20) rasio tingkat investasi dalam negeri terhadap PDRB; (21) rasio investasi luar negeri terhadap PDRB; (22) rasio tabungan terhadap PDRB; (23) neraca perdagangan (rasio ekspor impor); (24) rasio perdagangan internasional; (25) indeks pembangunan manusia; (26) pertumbuhan ekonomi (PDB); (27) pendapatan perkapita; (28) indeks kebahagiaan masyarakat; (29) indeks tendensi konsumen; (30) APBD per kapita (rasio total APBD terhadap

jumlah penduduk); dan (31) jumlah aset perbankan syariah (rasio aset bank syariah terhadap aset bank konvensional).³⁶

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder dari lembaga yang berwenang. Basis data yang digunakan adalah tahun 2014. Adapun rincian sumber data untuk masing-masing indikator penelitian dapat dilihat di Lampiran 2. Objek penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi kecuali Kalimantan Utara disebabkan ketidaklengkapan data yang tersedia untuk provinsi tersebut. Provinsi tersebut dibagi menjadi 6 (enam) wilayah atau kepulauan, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, DKI Jakarta dan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, dan Maluku dan Papua.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa indeks keislaman ekonomi (IKE) merupakan indeks komposit dari tujuan sistem ekonomi Islam yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu (D_1) keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (D_2) kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan; dan (D_3) Implementasi sistem keuangan Islam. Ketiga dimensi tersebut disimbolkan dengan D (dimensi). Masing-masing dimensi dikalikan dengan tingkat bobotnya. Penentuan tingkat bobot didasarkan pada pertimbangan peneliti. Adapun model persamaannya adalah:

$$IKE = (D_1 \times 0.45) + (D_2 \times 0.45) + (D_3 \times 0.10) \dots\dots\dots (1)$$

Selanjutnya, D_n yang merupakan simbol dari tujuan konsep, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh sistem ekonomi Islam merupakan nilai komposit dari Elemen (E). nilai bobot untuk masing-masing elemen di bagi secara rata, yaitu $1/6$. Adapun model persamaannya adalah:

$$D_1 = 1/6 (E_{1,1} + E_{1,2} + E_{1,3} + E_{1,4} + E_{1,5} + E_{1,6}) \dots\dots\dots (2)$$

$$D_2 = 1/6 (E_{2,1} + E_{2,2} + E_{2,3} + E_{2,4} + E_{2,5} + E_{2,6}) \dots\dots\dots (3)$$

$$D_3 = 1 (E_{3,1}) \dots\dots\dots (4)$$

Selanjutnya, E_n diturunkan dari nilai komposit indeks Indikator (I) atau variabel dengan model persamaan sebagai berikut:

$$E_{1,1} = 1/3 (I_{1,1,1} + I_{1,1,2} + I_{1,1,3}) \dots\dots\dots (5)$$

$$E_{1,2} = 1/3 (I_{1,2,1} + I_{1,2,2} + I_{1,2,3}) \dots\dots\dots (6)$$

$$E_{1,3} = 1/2 (I_{1,3,1} + I_{1,3,2}) \dots\dots\dots (7)$$

$$E_{1,4} = 1/4 (I_{1,4,1} + I_{1,4,2} + I_{1,4,3} + I_{1,4,4}) \dots\dots\dots (8)$$

$$E_{1,5} = (I_{1,5,1}) \dots\dots\dots (9)$$

$$E_{1,6} = 1/3 (I_{1,6,1} + I_{1,6,2} + I_{1,6,3}) \dots\dots\dots (10)$$

$$E_{2,1} = 1/4 (I_{2,1,1} + I_{2,1,2} + I_{2,1,3} + I_{2,1,4}) \dots\dots\dots (11)$$

$$E_{2,2} = 1/5 (I_{2,2,1} + I_{2,2,2} + I_{2,2,3} + I_{2,2,4} + I_{2,2,5}) \dots\dots\dots (12)$$

$$E_{2,3} = 1/2 (I_{2,3,1} + I_{2,3,2}) \dots\dots\dots (13)$$

$$E_{2,4} = 1/2 (I_{2,4,1} + I_{2,4,2}) \dots\dots\dots (14)$$

$$E_{2,5} = 1/3 (I_{2,5,1} + I_{2,5,2} + I_{2,5,3}) \dots\dots\dots (15)$$

$$E_{2,6} = 1/4 (I_{2,6,1} + I_{2,6,2} + I_{2,6,3} + I_{2,6,4}) \dots\dots\dots (16)$$

$$E_{3,1} = 1/2 (I_{3,1,1} + I_{3,1,2}) \dots\dots\dots (17)$$

$$E_{3,2} = (I_{3,2,1}) \dots\dots\dots (18)$$

Keterangan simbol persamaan di atas dapat dilihat pada Lampiran 1.

Proses penghitungan indeks atas data-data sekunder pada indikator-indikator ekonomi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan nilai minimum dan maksimum. Adapun formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{nilai aktu al} - \text{nilai min}}{\text{nilai maks} - \text{nilai min}} \times 100$$

Nilai aktual adalah nilai yang terjadi pada data indikator di masing-masing provinsi. Sementara nilai maks dan min adalah nilai maksimum dan minimum pada data indikator di masing-masing provinsi di Indonesia. Semua data indikator yang didapatkan terlebih dahulu

dilakukan normalisasi data. Dalam melakukan normalisasi data, penelitian ini mengadopsi pendekatan yang digunakan oleh UNDP dalam membuat Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks), yaitu pertama jika data indikatornya bersifat negatif seperti rasio gini, tingkat inflasi dan pengangguran maka formula normalisasi datanya dengan menggunakan formula $(100 - \text{data indikator})/100$ dimana data rasio gini, inflasi dan pengangguran dihitung dalam persentase. Jika data indikator tidak dalam bentuk persentase, yaitu antara 1 dan 100 tetapi dalam desimal maka formula normalisasinya menjadi $1 - \text{data indikator}$ (rasio gini, inflasi dan pengangguran). Data indikator bersifat negatif maksudnya adalah data yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai datanya maka semakin buruk kinerjanya.

Hasil komposit indeks akan memberikan informasi tentang tingkat keIslaman ekonomi masing-masing provinsi di Indonesia, begitupula dengan peringkat rangkingnya. Sehingga akan terlihat provinsi mana yang paling tinggi “keIslaman” ekonominya berdasarkan model yang dikembangkan dalam penelitian ini. Berdasarkan model indeks keIslaman ekonomi akan ditemukan nilai skor indeks masing-masing provinsi di Indonesia sebagai representasi kinerja pencapaian terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh sistem ekonomi Islam. Setelah melakukan penghitungan indeks untuk masing-masing provinsi maka akan ditemukan skor indeks untuk masing-masing provinsi tersebut. Nilai indeks adalah hasil komposit dari berbagai elemen yang dibobotkan.

Metode analisis yang digunakan atas hasil indeks penelitian adalah deskriptif-eksploratif yaitu melakukan penguraian dan eksplorasi atas capaian indeks masing-masing provinsi beserta alasan-alasannya yang relevan. Metode deskriptif adalah upaya untuk menjelaskan atau mencatat kondisi atau sikap untuk menjelaskan menggambarkan atau menggambarkan apa yang terjadi saat ini. Sementara eksploratif adalah upaya untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti secara detail dan mendalam.³⁷

Penelitian ini juga menggunakan metode analisis komparatif atas temuan skor indeks masing-masing provinsi. Kinerja indeks satu provinsi dikomparasikan dengan provinsi lainnya, atau kinerja indeks suatu wilayah/pulau dikomparasikan dengan kinerja indeks dengan wilayah/pulau lainnya. Sehingga hasilnya, indeks dapat menampilkan kinerja provinsi atau wilayah yang berkinerja tinggi secara keseluruhan indeks atau hanya dimensi-dimensinya dan begitupula dengan provinsi atau wilayah yang sebaliknya, yaitu kinerja indeksnya paling rendah.

Dalam mengelola data, penelitian ini menggunakan alat bantuan Microsof Excel. Program tersebut digunakan dalam melakukan normalisasi data dan pembentukan indeks. Begitupula dalam menampilkan hasil indeks dalam bentuk Grafik (*bar chart*). Nilai skor indeks antara skala 1 sampai 100. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi kinerjanya, begitupula sebaliknya. Selanjutnya indeks skor dibaca dalam bentuk poin.

C. Hasil dan Analisis

Penelitian ini berusaha untuk merengking tingkat keIslaman perekonomian Indonesia dengan menggunakan adaptasi model 'Indeks KeIslaman Ekonomi' atau IKE. Perekonomian Indonesia yang dimaksud adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang jumlahnya mencapai 33 provinsi, minus provinsi Kalimantan Utara dikarenakan ketidaklengkapan data yang dimiliki. Sementara model EII yang dikembangkan dalam penelitian berdasarkan kajian studi literatur yang menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam pada prinsipnya ingin mencapai 3 (tiga) tujuan utama, yaitu (1) keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan; dan (3) Implementasi sistem keuangan Islam. Selanjutnya, ketiga tujuan (dimensi) tersebut diturunkan menjadi 12 elemen utama, yaitu (1) peluang ekonomi dan kebebasan ekonomi; (2) keadilan dalam pengelolaan ekonomi; (3) perlakuan terhadap tenaga kerja; (4) Distribusi kekayaan dan pendapatan; (5) Standar etika, transparansi, kejujuran

dan keterbukaan; (6) Stabilitas ekonomi; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Pengurangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar; (9) Infrastruktur dan layanan sosial; (10) tingkat tabungan dan investasi; (11) Tingkat perdagangan; (12) Kesejahteraan ekonomi; dan (13) penghilangan riba. Namun, hasil penelitian ini hanya menampilkan 12 elemen saja tanpa elemen ke-5 standar etika transparansi, kejujuran dan keterbukaan dikarenakan kesulitan untuk mendapatkan data yang representatif. Ke-12 elemen tersebut diturunkan dalam beberapa indikator ekonomi. Penelitian ini menggunakan 33 indikator ekonomi yang menjadi proxi dari 'indeks keIslaman ekonomi' yang digunakan dalam penelitian ini. Indeks keIslaman ekonomi itu sendiri ada merupakan nilai komposit dari keseluruhan indeks tersebut. Dasar tahun dari data sekunder yang digunakan adalah tahun 2014.

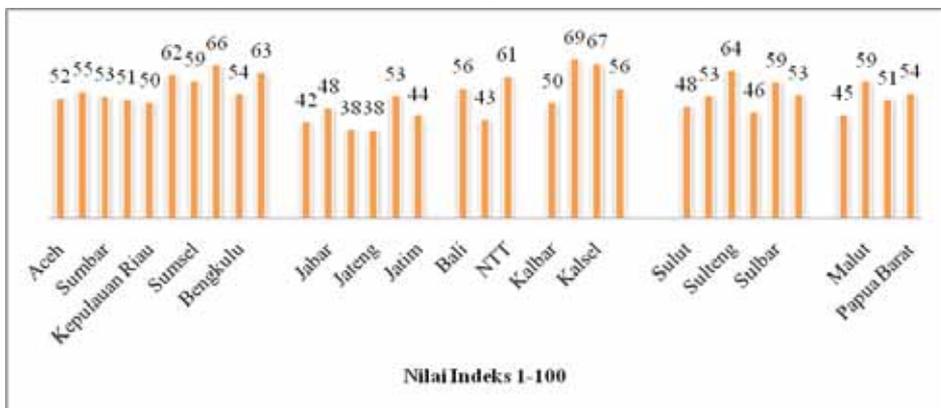
1. Indeks Dimensi Keadilan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Tujuan sistem ekonomi Islam yang pertama adalah keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dimensi ini diturunkan menjadi 6 (enam) elemen utama yaitu, (1) peluang ekonomi dan kebebasan ekonomi; (2) keadilan dalam pengelolaan ekonomi; (3) perlakuan terhadap tenaga kerja; (4) Distribusi kekayaan dan pendapatan; (5) Standar etika, transparansi, kejujuran dan keterbukaan; dan (6) Stabilitas ekonomi. Adapun peringkat EII masing-masing provinsi di Indonesia disajikan dalam Grafik 1.

Berdasarkan Grafik 1, nilai indeks tertinggi adalah sebesar 69 poin yang ditempati oleh provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Sementara nilai terendah sebanyak 38 poin yang ditempati oleh provinsi Banten dan Jawa Tengah. Secara keseluruhan, nilai indeks untuk masing-masing provinsi di Indonesia untuk dimensi ini relatif hampir sama. Setidaknya terdapat 6 (enam) provinsi yang memiliki nilai indeks di atas 60 poin, yaitu Kalimantan Selatan (67 poin), Belitung (66 poin), Sulawesi Tengah (64 poin), Lampung (63 poin), Jambi (62 poin) dan Nusa Tenggara Timur (61 poin).

Provinsi yang nilai skor indeks kurang dari 50 poin adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Selain provinsi yang telah disebutkan sebelumnya memiliki skor indeks antara 50-60 poin.

Provinsi Kalimantan Tengah dapat menempati rangking pertama untuk dimensi ini disebabkan provinsi tersebut konsisten memiliki nilai tinggi pada indikator persentase pekerja terhadap angkatan kerja, gini rasio, inflasi, rata-rata upah, upah minimum, tingkat diskriminasi upah, dan gender equality index. Dan menariknya adalah Kalimantan memiliki nilai indeks yang rata-rata di atas 50 poin untuk kategori ini.



Grafik 1

Keadilan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

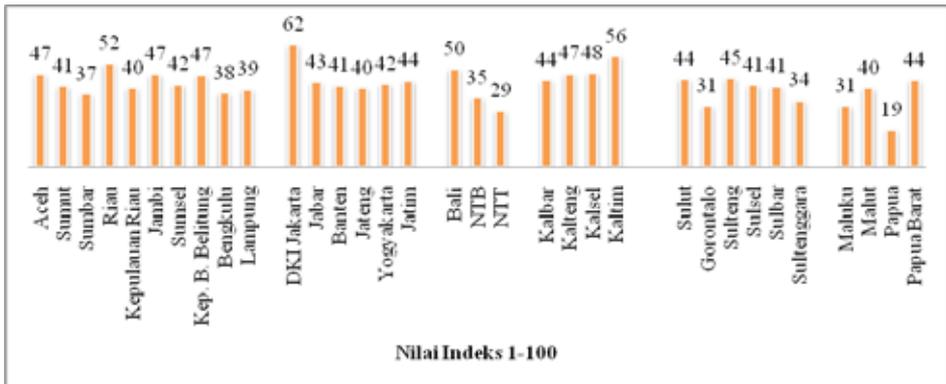
Provinsi Banten dan Jawa Tengah menjadi peringkat terbawah untuk dimensi ini dikarenakan tingkat gini rasio yang sangat parah, inflasi, persentase angkatan kerja dan persolan upah yang rendah. Hasil yang cukup mengagetkan juga terlihat pada skor indeks rata-rata wilayah Jawa yang di bawah 50 poin, hanya Yogyakarta yang memiliki poin di atas 50 poin. Artinya, untuk wilayah Jakarta dan Jawa memiliki masalah dari segi stabilitas ekonomi, distribusi kekayaan dan pendapatan, perlakuan terhadap tenaga kerja dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.

Temuan menarik lainnya yang ditampilkan pada Grafik 1 adalah ternyata wilayah Sumatera memiliki skor indeks rata-rata di atas dari 50 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa dari segi pencapaian keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Angka yang sama pula terlihat untuk wilayah Maluku dan Papua, kecuali Provinsi Maluku yang skornya di bawah 50 poin.

2. Indeks Dimensi Kesejahteraan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan

Tujuan yang ingin dicapai dari sisten ekonomi Islam nomor kedua adalah kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dimensi ini selanjutnya diturunkan menjadi 6 (enam) elemen utama, yaitu (i) pengembangan pendidikan; (ii) pengurangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar; (iii) Infrastruktur dan layanan sosial; (iv) tingkat tabungan dan investasi; (v) tingkat perdagangan; dan (6) kesejahteraan ekonomi. Dari keenam elemen tersebut selanjutnya direpresentasikan melalui 22 indikator ekonomi. Grafik 2 menampilkan hasil indeks masing-masing provinsi di Indonesia untuk dimesi kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Berbeda dengan dimensi sebelumnya, DKI Jakarta justru menempati peringkat pertama untuk dimensi kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan dengan nilai indeks mencapai 62 poin. Angka ini cukup signifikan perbedaannya dengan peringkat kedua yang ditempati oleh provinsi Kalimantan Timur dengan nilai indeks 56 poin. Ironisnya, hanya terdapat 4 (empat) provinsi yang memiliki skor indeks di atas 50 poin, yaitu DKI Jakaarta (62 poin), Kalimantan Timur (56 poin), Riau (52) dan Bali (50 poin). Dengan demikian, keempat provinsi tersebut relatif baik dari segi pengembangan pendidikan, pengurangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar, infrastruktur dan layanan sosial, tabungan dan investasi, perdagangan dan kesejahteraan ekonomi.



Grafik 2

Kesejahteraan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan

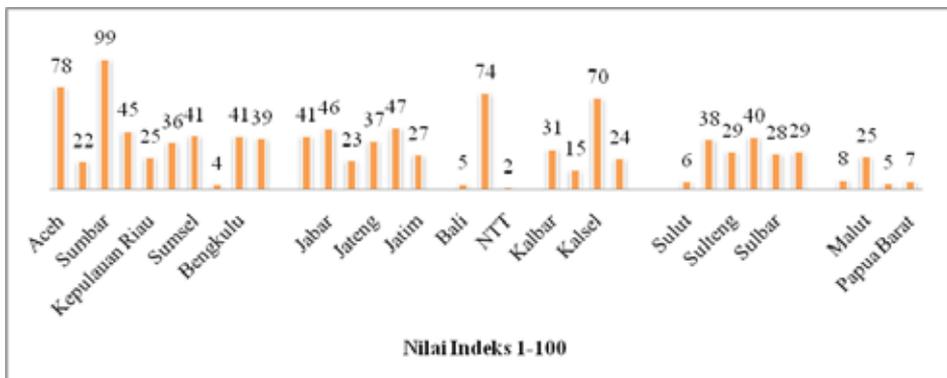
Makna lain yang dapat disimpulkan dari hasil indeks ini adalah bahwa secara umum seluruh provinsi di Indonesia memiliki masalah dari segi kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Hal ini terlihat dengan nilai indeks di bawah 50 poin. Dan provinsi yang paling bermasalah untuk dimensi ini adalah provinsi Papua dengan nilai skor 19 poin. Nilai indeks ini sangat jauh dibandingkan dengan Papua Barat (44 poin) yang sama-sama berada dalam wilayah yang sama. Artinya terdapat kesenjangan capaian ekonomi khususnya pada dimensi kedua di wilayah Papua. Persolan serius yang dihadapi oleh Papua yang menyebabkan nilai indeksnya terendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia adalah masalah pendidikan terutama pada tingkat melek hidup dan kekurangan jumlah sekolah per kecamatan. Persoalan kedua yang dihadapi oleh provinsi Papua adalah masalah infrastruktur dan layanan sosial yang rendah. Nilai komposit dari indikator ini menyebabkan indeks skornya menurun. Persoalan serius lainnya adalah rendahnya kesejahteraan ekonomi yang terlihat pada indikator indeks pembangunan manusia (IPM) rendah, pertumbuhan ekonomi yang minus (tahun 2014), dan tingkat kebahagiaan masyarakat yang rendah yang terlihat pada nilai indeks kebahagiaan masyarakat yang rendah. Persoalan untuk dimensi ini juga nampaknya dihadapi oleh wilayah Nusa Tenggara yang terlihat pada nilai skor indeks untuk masing-

masing Nusa Tenggara Timur (29 poin) dan Nusa Tenggara Barat (35 poin) yang juga relatif lebih rendah.

Hasil yang cukup menarik terjadi pada wilayah Sumatera. Meskipun secara rata-rata wilayah tersebut memiliki indeks di bawah 50 poin, tetapi nilainya tidak terlalu timpang antara satu provinsi dengan provinsi yang lain. Provinsi lainnya yang cukup rendah adalah provinsi Gorontalo dengan nilai skor 31 poin. Masalah yang dihadapi oleh provinsi ini adalah tingkat tabungan dan investasi yang cukup rendah, terutama investasi luar dan dalam negeri, begitupula dengan rasio tabungan masyarakatnya.

3. Indeks Dimensi Implementasi Sistem Keuangan Syariah

Tujuan ketiga yang ingin dicapai dari sistem ekonomi Islam yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah implementasi sistem ekonomi syariah dalam perekonomian. Adapun elemen yang digunakan adalah penghilangan riba dengan menggunakan rasio dana pihak ketiga (DPK) bank syariah terhadap dana pihak ketiga (DPK) bank konvensional sebagai indikator satu-satunya pada dimensi ini. Penggunaan hanya satu indikator ini disebabkan adanya keterbatasan data untuk masing-masing provinsi yang ada. Hasil indeks untuk masing-masing provinsi disajikan pada Grafik 3.



Grafik 3
Implementasi Sistem Keuangan Syariah

Grafik 3 menunjukkan bahwa untuk kategori implementasi sistem keuangan syariah provinsi Sumatera Barat memiliki poin tertinggi sebesar 99 poin dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi Aceh selanjutnya menempati ranking kedua dengan poin 78. Hasil indeks yang relatif tinggi juga diperlihatkan oleh provinsi Nusa Tenggara Barat (74) dan Kalimantan Selatan (70 poin). Skor indeks ini hanya sekedar menunjukkan bahwa untuk perbandingan rasio DPK bank syariah dengan bank konvensional maka ketiga provinsi tersebut yang memiliki rasio terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat termasuk provinsi yang memiliki rasio yang paling rendah dengan nilai indeks di bawah 10 poin.

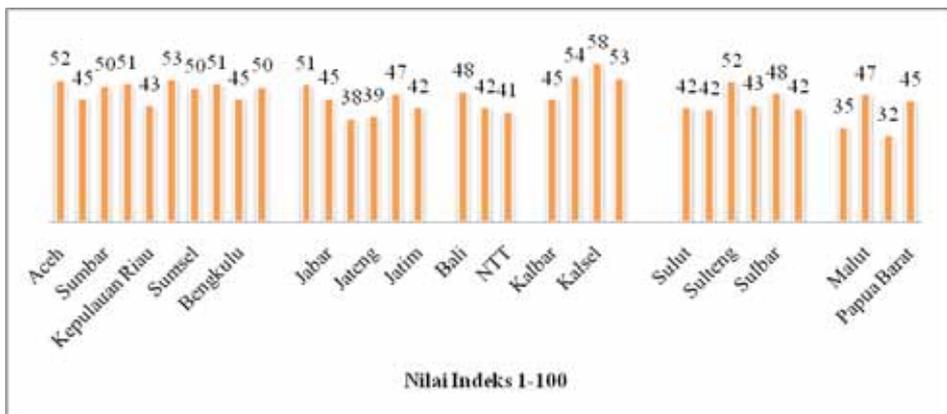
4. Peringkat KeIslaman Ekonomi Perekonomian Indonesia

Grafik 4 menyajikan hasil indeks keIslaman perekonomian provinsi-provinsi di Indonesia. Indeks ini merupakan komposit indeks dari tiga dimensi utama yang dikembangkan dalam penelitian ini. Ketiga dimensi tersebut merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh sistem ekonomi Islam, yaitu (1) keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan; dan (3) Implementasi sistem keuangan Islam.

Berdasarkan kinerja indeks keIslaman sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 4 ditemukan bahwa provinsi Kalimantan Selatan memiliki peringkat skor indeks tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai 58 poin. Sementara peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dengan nilai masing-masing indeks sebesar 54 poin dan 53 poin. Skor indeks Kalimantan Timur sama dengan nilai provinsi Jambi (53 poin). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pulau (wilayah) Kalimantan relatif lebih tinggi capaian kinerja indeks keIslamannya dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, seperti pula Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara. Artinya adalah pulau Kalimantan relatif lebih baik dari

segi pencapaian tujuan dari sistem ekonomi Islam dalam kinerja ekonomi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Hal ini diindikasikan dengan peringkat 1, 2 dan 3 masing-masing ditempati oleh provinsi yang ada di pulau Sumatera.

Dimensi yang memberikan kontribusi terbesar dari nilai indeks provinsi Kalimantan Selatan adalah dari dimensi keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Khususnya pada distribusi kekayaan dan pendapatan dan stabilitas ekonomi. *Leading facctor* lainnya adalah dari segi rasio aset keuangan syariah dibandingkan dengan konvensional. Faktor penggerak dari peringkat provinsi Kalimantan Tengah relatif sama dibandingkan dengan provinsi Kalimantan Selatan. Faktor yang menyebabkan skor indeksnya lebih rendah disebabkan faktor aset perbankan syariah yang lebih rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Provinsi Kalimantan Timur dan Jambi sebagai peringkat keempat atas kinerja indeks keIslaman ekonomi disebabkan nilai rata-rata dari ketiga dimensi indeks keIslaman ekonomi relatif merata.



Grafik 4

Indeks KeIslaman Perekonomian Indonesia

Grafik 4 juga menunjukkan bahwa Papua dan Maluku memiliki kinerja indeks keIslaman ekonomi yang paling rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya dengan nilai skor masing-masing sebesar 32

poin dan 35 poin. Dan secara kinerja wilayah, pulau maluku dan papua memiliki kinerja indeks dibawah 50 poin, dengan rincian provinsi Papua Barat 45 poin dan Maluku Utara 47 poin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki capaian kinerja indeks keIslaman ekonomi yang relatif lebih rendah. Kedua wilayah tersebut memiliki masalah utama pada dimensi kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan dan dimensi kinerja perbankan syariah (aset perbankan syariah). Persoalan utama yang dihadapi oleh provinsi Papua adalah pada aspek pendidikan, infrastruktur dan pelayanan sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Sementara provinsi Maluku memiliki persoalan pada tingkat tabungan dan investasi dan tingkat perdagangan. Namun bedanya, provinsi Maluku relatif lebih baik pada aspek pendidikan, kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi dibandingkan dengan provinsi Papua. Persoalan serius juga yang dihadapi oleh Provinsi Papua adalah pada dimensi keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan, yaitu terutama pada aspek distribusi kekayaan dan pendapatan yang ditunjukkan dengan nilai gini rasio yang sangat tinggi. Namun disisi lain, provinsi Papua relatif lebih baik pada aspek stabilitas ekonomi dan perlakuan terhadap tenaga kerja begitupula pada persentasi bekerja terhadap angkatan kerja serta tingkat pengangguran yang relatif rendah.

D. Kesimpulan

Dengan menggunakan model indeks keIslaman ekonomi sebagai model pengukuran kinerja ekonomi dengan menggunakan data tahun 2014 dengan ruang lingkup 33 provinsi di Indonesia ditemukan bahwa provinsi Kalimantan Selatan menempati peringkat tertinggi dalam kinerja indeks keIslaman ekonomi dengan skor indeks 58 poin. Dengan demikian dapat diartikan bahwa provinsi tersebut memiliki kinerja tertinggi dalam hal pencapaian dari tujuan yang ingin dicapai oleh sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Selanjutnya, setidaknya terdapat 11 provinsi dari total

provinsi di Indonesia yang memiliki skor indeks di atas 50 poin, yaitu Kalimantan Tengah (54 poin), Kalimantan Timur (53), Jambi (53), Aceh (52), Sulawesi Tengah (52), Riau (51), Kepulauan B. Belitung (51), DKI Jakarta (51), Sumatera Barat (50), dan Sumatera Selatan (50). Dengan demikian, secara umum bahwa rata-rata wilayah/provinsi di Indonesia memiliki kinerja indeks pada pencapaian tujuan sistem ekonomi Islam yang relatif rendah. Ini menunjukkan bahwa faktor jumlah mayoritas populasi Muslim di hampir seluruh provinsi di Indonesia tidak menjadi faktor pengaruh utama dalam pencapaian tujuan ekonomi.

Kepulauan Sumatera dan Kalimantan secara rata-rata memiliki kinerja indeks keislaman ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal tersebut berbeda dengan wilayah Jawa, Sulawesi dan Maluku & papua yang justru indeks kinerja ekonominya (indeks keislaman ekonomi) relatif rendah, yaitu rata-rata nilai komposit indeksnya di bawah 50 poin. Wilayah papua dan Maluku misalnya, memiliki kinerja ekonomi yang buruk hampir di semua aspek (elemen) indeks yang selanjutnya menjadi faktor penyebab rendahnya komposit indeks.

Selanjutnya, dari tiga dimensi utama sebagai pembentuk komposit indeks keislaman ekonomi ditemukan bahwa dimensi keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang secara rata-rata seluruh wilayah di Indonesia memiliki kinerja yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan dua dimensi lainnya. Sementara pada dimensi kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan hanya terdapat empat provinsi dari total provinsi yang ada yang memiliki kinerja indeks di atas 50 poin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wilayah/provinsi di Indonesia secara rata-rata memiliki kinerja yang rendah pada dimensi ini.

Persoalan lainnya yang dihadapi oleh rata-rata semua provinsi di Indonesia adalah pada dimensi implementasi sistem keuangan syariah yang direpresentasikan oleh jumlah aset bank syariah dibandingkan

dengan aset bank konvensional. Secara umum rasio ini relatif rendah untuk semua provinsi yang ada. Ini menandakan bahwa sistem perbankan syariah di Indonesia belum berkembang secara maksimal. Jumlah populasi mayoritas muslim tidak menjadi jaminan munculnya permintaan yang tinggi pada produk dan layanan terhadap bank syariah.³⁸ Rasio yang secara rata-rata sangat rendah tersebut sama dengan kinerja perbankan syariah secara nasional yang total pangsa pasar asetnya belum mencapai 5 persen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Salman Syed Ali, and Hamid Hasan. *Towards a Maqasid Al-Shariah Based Development Index*. N.p., 2014.
- Anto, M B Hendrie. "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries." *Islamic Economic Studies* 19.2 (2011).
- Barro, Robert J., and Rachel M. McCleary. "Religion and Economic Growth." *Milken Institute Review* Second Quarter 2004 (2004).
- Barro, Robert J., and Rachel M. McCleary. "Religion and Economic Growth across Countries." *American Sociological Review* 68.5 (2003).
- Beik, Irfan Syauqi. "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika." *Jurnal Pemikiran dan Wawasan* II.3 (2009).
- Campante, Filipe, and David Yanagizawa-Drott. "Does Religion Affect Economic Growth and Happiness? Evidence from Ramadan." *Quarterly Journal of Economics* 130.2 (2015).
- Grier, Robin. "The Effect of Religion on Economic Development: A Cross National Study of 63 Former Colonies." *Kyklos* 50.1 (1997).
- Hasan, H, and S Syed. *Towards a Maqasid Al-Shariah Based Development Index*. Jedah: N.p., 2014.
- Iannaccone, Lr. "Introduction to the Economics of Religion." *Journal of economic literature* 36.3 (1998).
- Kahf, Monzer. "Islamic Economic System – A Review." *An Introduction to Islamic Economics*. New Delh: Kitab Bhavan, 1999.
- Matta, Anis. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam." *Wawasan Islam Dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: FE UI Press, 1997.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nath, Sushmit. *Religion & Economic Growth and Development*. Germany: N.p., 2007.

- Noland, Marcus. "Religion and Economic Performance." *World Development* 33.8 (2005).
- Omar, W. A. Wan, Fauzi Hussin, and Ali G. H Asan. "The Trend Analysis of Islamization in Malaysia Using Islamization Index as Indicato." *Asian Economic and Financial Review* 4.10 (2014).
- Rama, Ali. "Agama dan Aktivitas Ekonomi." *Koran Kompas* 2015: 6.
- Rama, Ali. "Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam." *Iqtishad* VI.1 (2014).
- Rama, Ali. "Indeks KeIslaman Ekonomi." *Koran Republika* Feb. 2016: 6.
- Rama, Ali. "Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Signifikan* 2.1 (2013).
- Rama, Ali. "Potensi Ekonomi Syariah Global." *Koran Republika* 2014: 6.
- Rama, Ali. *Mengukur Tingkat KeIslaman Ekonomi Indonesia*. Laporan Penelitian Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Rama, Ali. *Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Rama, Ali, and Salina H Kassim. "Analyzing Determinants of Assets and Liabilities in Islamic Banks: Evidence from Indonesia." *Review of Islamic Economics, Finance, and Banking* 1.1 (2013).
- Rama, Ali, and Makhilani. "Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Dialog* 1.1 (2013).
- Rehman, Scheherazade S., and Hossein Askari. "An Economic IslamicityIndex (EI2)." *Global Economy Journal* 10.3 (2010): n. pag.
- Rehman, Scheherazade S., and Hossein Askari. "How Islamic Are Islamic Countries?" *Global Economy Journal* 10.2 (2010).
- Sekaran, Uma. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. New York: John Wiley&Sons, 2000.

Lampiran 1:

Tabel 1: Konsep Operasional Indeks Keislaman Ekonomi Indonesia

Tujuan Sistem Ekonomi Islam (Dimensi: D)		Prinsip Ekonomi Islam (Elemen: E)		Variabel Ekonomi (Indikator: I)	
D ₁	Keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	E _{1,1}	Peluang ekonomi dan kebebasan ekonomi	I _{1,1}	Persentase bekerja terhadap angkatan kerja
		E _{1,2}	Keadilan dalam pengelolaan ekonomi	I _{2,1}	Tingkat diskriminasi upah (kesenjangan gaji antara perempuan dan laki-laki)
				I _{2,2}	Gender equality index
		E _{1,3}	Perlakuan terhadap tenaga kerja	I _{3,1}	Tingkat upah minimum
				I _{3,2}	Rata-rata tingkat upah pekerja
		R _{1,4}	Distribusi kekayaan dan pendapatan	I _{4,2}	Tingkat ketimpangan pendapatan (rasio Gini)
		E _{1,5}	Standar etika, transparansi, kejujuran dan keterbukaan	I _{5,1}	Tingkat persepsi korupsi
		E _{1,6}	Stabilitas ekonomi	I _{6,1}	Tingkat inflasi
I _{6,2}	Tingkat pengangguran				

				I _{6,3}	Tingkat kriminalitas (jumlah tindak pidana per total populasi)
D ₂	Kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan	E _{2,1}	Pengembangan pendidikan	I _{2,1,1}	Tingkat melek hidup
				I _{2,1,2}	Alokasi anggaran pendidikan per kapita (rasio alokasi APBD untuk pendidikan terhadap attending school)
				I _{2,1,3}	Lembaga pendidikan (sekolah) per kecamatan)
		E _{2,2}	Pengurangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar	I _{2,2,1}	Tingkat kemiskinan
				I _{2,2,2}	Umur harapan hidup
				I _{2,2,3}	Kepemilikan rumah
				I _{2,2,4}	Akses air bersih
				I _{2,2,5}	Ketersediaan listrik
		E _{2,3}	Infrastruktur dan layanan sosial	I _{2,3,1}	Rasio puskesmas per kecamatan
				I _{2,3,2}	Alokasi anggaran untuk kesehatan (rasio alokasi APBD untuk kesehatan terhadap total populasi)
I _{2,3,3}	Alokasi belanja				

					untuk perlindungan sosial (rasio alokasi APBD untuk perlindungan sosial terhadap total populasi)
				I_{2,3,4}	Alokasi belanja untuk modal (rasio alokasi APBD untuk modal terhadap total populasi)
	E_{2,4}	Tingkat tabungan dan investasi		I_{2,4,1}	Rasio tingkat investasi dalam negeri terhadap PDRB
				I_{2,4,2}	Rasio investasi luar negeri terhadap PDRB
				I_{2,4,3}	Rasio tabungan terhadap PDRB
	E_{2,5}	Tingkat perdagangan		I_{2,5,1}	Neraca perdagangan (rasio ekspor impor)
				I_{2,5,2}	Rasio perdagangan internasional
	E_{2,6}	Kesejahteraan ekonomi		I_{2,6,1}	Indeks pembangunan manusia
				I_{2,6,2}	Pertumbuhan ekonomi
				I_{2,6,3}	Pendapatan per kapita
				I_{2,6,4}	Indeks kebahagiaan

					masyarakat
				I _{2,6,5}	Indeks tendensi konsumen
				I _{2,6,6}	APBD per kapita (rasio total APBD terhadap jumlah penduduk)
D ₃	Implementasi sistem keuangan Islam	E _{3,1}	Penghilangan riba	I _{3,1,2}	Jumlah Aset perbankan syariah (rasio aset bank syariah terhadap aset bank konvensional)
		E _{3,2}	Zakat	I _{3,2,1}	Jumlah pengumpulan zakat

Lampiran 2:

Tabel 2: Sumber Data Indikator Ekonomi

Simbol	Indikator Ekonomi (Indikator: I)	Sumber Data
I _{1,1}	Persentase bekerja terhadap angkatan kerja	Badan Pusat Statistik (BPS)
I _{2,1}	Tingkat diskriminasi upah (kesenjangan gaji antara perempuan dan laki-laki)	Badan Pusat Statistik (BPS)
I _{2,2}	Gender equality index	
I _{3,1}	Tingkat upah minimum	Badan Pusat Statistik (BPS)
I _{3,2}	Rata-rata tingkat upah pekerja	Badan Pusat Statistik (BPS)
I _{4,2}	Tingkat ketimpangan pendapatan (rasio Gini)	Badan Pusat Statistik (BPS)
I _{5,1}	Tingkat persepsi korupsi	Badan Pusat Statistik (BPS)
I _{6,1}	Tingkat inflasi	Bank Indonesia

I _{6,2}	Tingkat pengangguran	Badan Pusat Statistik (BPS)
I _{6,3}	Tingkat kriminalitas (jumlah tindak pidana per total populasi)	Badan Pusat Statistik (BPS)
I _{2,1,1}	Tingkat melek hidup	Badan Pusat Statistik (BPS)
I _{2,1,2}	Alokasi anggaran pendidikan per kapita (rasio alokasi APBD untuk pendidikan terhadap attending school)	Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia
I _{2,1,3}	Lembaga pendidikan (sekolah) per kecamatan)	Badan Pusat Statistik (BPS)
I _{2,2,1}	Tingkat kemiskinan	Badan Pusat Statistik (BPS)
I _{2,2,2}	Umur harapan hidup	Badan Pusat Statistik (BPS)
I _{2,2,3}	Kepemilikan rumah	Badan Pusat Statistik (BPS)
I _{2,2,4}	Akses air bersih	Badan Pusat Statistik (BPS)
I _{2,2,5}	Ketersediaan listrik	Badan Pusat Statistik (BPS)
I _{2,3,1}	Rasio puskesmas per kecamatan	Badan Pusat Statistik (BPS)
I _{2,3,2}	Alokasi anggaran untuk kesehatan (rasio alokasi APBD untuk kesehatan terhadap total populasi)	Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan
I _{2,3,3}	Alokasi belanja untuk perlindungan sosial (rasio alokasi APBD untuk perlindungan sosial terhadap total populasi)	Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan
I _{2,3,4}	Alokasi belanja untuk modal (rasio alokasi APBD untuk modal terhadap total populasi)	Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan

I _{2,4,1}	Rasio tingkat investasi dalam negeri terhadap PDRB	Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia
I _{2,4,2}	Rasio investasi luar negeri terhadap PDRB	Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia
I _{2,4,3}	Rasio tabungan terhadap PDRB	Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia
I _{2,5,1}	Neraca perdagangan (rasio ekspor impor)	Bank Indonesia
I _{2,5,2}	Rasio perdagangan internasional	Bank Indonesia
I _{2,6,1}	Indeks pembangunan manusia	Badan Pusat Statistik
I _{2,6,2}	Pertumbuhan ekonomi (PDB)	Badan Pusat Statistik
I _{2,6,3}	Pendapatan per kapita	Badan Pusat Statistik
I _{2,6,4}	Indeks kebahagiaan masyarakat	Badan Pusat Statistik
I _{2,6,5}	Indeks tendensi konsumen	Badan Pusat Statistik
I _{2,6,6}	APBD per kapita (rasio total APBD terhadap jumlah penduduk)	Badan Pusat Statistik
I _{3,1,2}	Jumlah Aset perbankan syariah (rasio aset bank syariah terhadap aset bank konvensional)	Bank Indonesia

Endnotes

1. Ali Rama. "Potensi Ekonomi Syariah Global", dalam *Koran Republika* 2014: 6.
2. Lihat, misalnya, Barro, Robert J. Baro and Rachel M. McCleary, "Religion and Economic Growth", dalam *Milken Institute Review Second Quarter* 2004, h. 36–45. Sushmit Nath. *Religion & Economic Growth and Development*. Germany: N.p., 2007; dan Marcus Noland, "Religion and Economic Performance." *World Development* 2005, 33.8, h. 1215–1232.
3. Lihat, misalnya, Robert J. Barro and Rachel M. McCleary, "Religion and Economic Growth across Countries." Dalam *American Sociological Review* 2003, 68.5, h.760–781. Filipe Campante and David Yanagizawa-Drott, "Does Religion Affect Economic Growth and Happiness? Evidence from Ramadan." dalam *Quarterly Journal of Economics* 2015, 130.2, h. 615–658. Robin Grier, "The Effect of Religion on Economic Development: A Cross National Study of 63 Former Colonies", dalam *Kyklos* 1997, 50.1, h. 47–62. dan Ali Rama, "Perbankan Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." dalam *Signifikan*, 2013, 2.1, h. 33–56.
4. Ali Rama. "Agama dan Aktivitas Ekonomi." *Koran Kompas* 2015, h. 6.
5. Scheherazade S. Rehman and Hossein Askari, "How Islamic Are Islamic Countries?" dalam *Global Economy Journal*, 2010, 10.2, h. 1–37.
6. Terminologi "Negara Islam" masih menjadi bahan perdebatan di kalangan intelektual Muslim. Penafsiran tentang negara Muslim dapat mengacu kepada tiga pandangan, yaitu: (1) pemerintahan yang mengadopsi Islam sebagai agama resmi negara, seperti Malaysia dan Mesir; (2) negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia dan Turki; dan (3) negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara Islam, seperti Pakistan dan Iran. Namun, secara umumnya istilah "Negara Islam" selalu merujuk kepada negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara.
7. Robert J. Barro and Rachel M. McCleary, "Religion and Economic Growth", dalam *Milken Institute Review Second Quarter*, 2004, h. 36–45.

8. M B Hendrie Anto, "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries", dalam *Islamic Economic Studies*, 2011, 19.2, h. 69–95.
9. H. Hasan and S Syed, *Towards a Maqasid Al-Shariah Based Development Index*. Jedah: N.p., 2014.
10. Mostafa Omar, Wan, Fauzi Hussin, and Ali G. H Asan, "The Trend Analysis of Islamization in Malaysia Using Islamization Index as Indicato." *Asian Economic and Financial Review*, 2014, 4.10, h. 1298–1313.
11. Scheherazade S. Rehman and Hossein Askari, "An Economic Islamicity Index (EI2)." dalam *Global Economy Journal*, 2010, 10.3.
12. Lihat Rehman and Askari, 2010.
13. Lihat Ali Rama, "Agama dan Aktivitas Ekonomi", dalam *Koran Kompas* 2015: 6.
14. Lr. Iannaccone, "Introduction to the Economics of Religion." dalam *Journal of economic literature*, 1998, 36.3, h. 1465–1495.
15. Lihat Scheherazade S. Rehman and Hossein Askari, "An Economic Islamicity Index (EI2)", dalam *Global Economy Journal*, 2010, 10.3.
16. Robert J. Barro and Rachel M. McCleary, "Religion and Economic Growth", dalam *Milken Institute Review* Second Quarter, 2004, h. 36–45.
17. Robert J. Barro and Rachel M. McCleary, "Religion and Economic Growth." Dalam *Milken Institute Review* Second Quarter, 2004, h. 36–45.
18. Lihat Filipe Campante and David Yanagizawa-Drott, "Does Religion Affect Economic Growth and Happiness? Evidence from Ramadan", dalam *Quarterly Journal of Economics*, 2015, 130.2, h. 615–658.
19. Robin Grier, "The Effect of Religion on Economic Development: A Cross National Study of 63 Former Colonies", dalam *Kyklos*, 1997, 50.1, h. 47–62.
20. Monzer Kahf, *Islamic Economic System – A Review. An Introduction to Islamic Economics*, New Delh: Kitab Bhavan, 1999.
21. Ali Rama, *Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Puslitpen UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2015.

22. Lihat Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika." dalam *Jurnal Pemikiran dan Wawasan*, 2009, II.3, h. 1–11.
23. Lihat Ali Rama, "Perbankan Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", dalam *Signifikan*, 2013, 2.1, h. 33–56.
24. Salman Syed Ali, and Hamid Hasan, *Towards a Maqasid Al-Shariah Based Development Index*. N.p., 2014.
25. Mustafa Omar. Wan, Fauzi Hussin, and Ali G. H Asan, "The Trend Analysis of Islamization in Malaysia Using Islamization Index as Indicato." dalam *Asian Economic and Financial Review*, 2014, 4.10, h. 1298–1313.
26. Scheherazade S. Rehman and Hossein Askari, "How Islamic Are Islamic Countries?", dalam *Global Economy Journal*, 2010, 10.2, h. 1–37.
27. Scheherazade S. Rehman and Hossein Askari, "An Economic Islamicity Index (EI2)", dalam *Global Economy Journal*, 2010, 10.3.
28. Scheherazade S. Rehman and Hossein Askari, *Ibid*,
29. Anis Matta, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam." *Wawasan Islam Dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: FE UI Press, 1997.
30. Lihat Ali Rama and Makhilani, "Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syariah", dalam *Dialog*, 2013, 1.1, h. 31–46.
31. Lihat Ali Rama, "Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam", dalam *Iqtishad*, 2014, VI.1, h. 22–52.
32. Lihat Ali Rama and Makhilani. "Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syariah", dalam *Dialog*, 2013, 1.1, h. 31–46.
33. Lihat Scheherazade S. Rehman and Hossein Askari, "An Economic Islamicity Index (EI2)." *Global dalam Economy Journal*, 2010, 10.3.
34. Dalam konteks penelitian ini, ke 12 dimensi dan indikator tersebut dimodifikasi sesuai dengan konteks di Indonesia.

35. Uma Sekaran,*Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. New York: John Wiley&Sons, 2000.
36. Untuk lebih detail penjelasan silahkan baca Ali Rama, *Mengukur Tingkat KeIslaman Ekonomi Indonesia*. Laporan Penelitian, Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
37. Morissan,*Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.
38. Ali Rama, "Indeks KeIslaman Ekonomi" dalam *Koran Republika* Feb. 2016, 6.